

**Ringkasan**  
**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam**  
**Pembangunan Nagari ( Suatu Kajian Dalam Kebijakan Program Dana**  
**Alokasi Umum Nagari di Kenagarian Panyakalan Kecamatan Kubung**  
**Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)**

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) terutama di desa atau nama lain seperti yang tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 ketentuan umum pasal 1. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam artian bahwa metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan, program, serta sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Sumatera Barat Sistem Pemerintahan yang terendah adalah nagari yang merupakan perubahan bentuk dari sistem pemerintahan desa yang lama. Kembalinya ke sistem pemerintahan nagari tentu saja membawa perbedaan dalam berbagai sektor tidak terkecuali sektor keuangan nagari. Mengenai keuangan Nagari diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN ) yang diberikan secara stimulan setiap tahunnya, dan masing-masing nagari akan mendapat pembagian yang berbeda-beda berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat ni nagari tersebut.

Kebijakan dana pembangunan nagari secara *bottom up* yang disebutkan, pada hakekatnya menjadi tidak lain dari suatu upaya politik *developmentalism* di nagari, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu *pertama*, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; *kedua*, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (A.Gany, 2001:5). Namun terjadi *democracy crisis*, suatu kondisi dimana proses pengambilan keputusan (kebijakan) yang menyangkut hajat hidup masyarakat, berjalan tanpa keterlibatan substansial (Moko,2001:3). Pembatasan akses rakyat nagari dalam arena pengambilan kebijakan (*political decision*), para pengambil kebijakan menempatkan diri layaknya pihak yang memiliki otonomi untuk mengambil keputusan, meskipun tanpa partisipasi politik dan persetujuan dari rakyat nagari (Juliantara, 2003:13).

Kartasmita (1997), menyebutkan bahwa studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi (politik) masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: 1).Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan. 2).Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut. 3).Pembangunan

dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. 4). Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan

Sehingga pergeseran kebijakan program dana pembangunan nagari yang komprehensif perlu keterlibatan politik masyarakat secara efektif dan dukungan berbagai sektor terpadu termasuk dukungan infrastruktur ekonomi yang tangguh memihak kepada kepentingan masyarakat sangat diperlukan guna mengakhiri pembatasan akses rakyat dalam proses pembangunan nagari. Kebijakan program dana pembangunan nagari, menitikberatkan pada aspek partisipasi politik masyarakat, respon terhadap program pembangunan dan aspek keberlanjutan program bagi masyarakat nagari ditengah keberagaman kemampuan dan kepentingan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sangat terbatas akan mewujudkan pengembangan program pembangunan yang tidak melahirkan kelompok terpinggirkan baru (Mujani, 2002:125). Partisipasi politik masyarakat nagari akan menghindari kebijakan program dana pembangunan nagari yang sentralistik, dan ditujukan bentuk kepentingan politik masyarakat (A.Gany, 2001:5). Dengan mengacu pada upaya (*political empowerment*) masyarakat nagari yang berprinsip pada lokalitas (*Friedman, 1992:168*) dan melepaskan diri dari paradigma yang bersifat *dependency creating* (*Tjokrowinoto, 1996:41*), maka dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya partisipasi politik aktif dari masyarakat.

Dalam era reformasi pada aras lokal dan sebagai upaya dalam rangka mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat nagari, inisiatif, inovatif, dan kreatif untuk mendorong kemajuan otonomi asli nagari dan menegakkan demokrasi lokal yang selama ini “terpendam” dan telah dimiliki masyarakat, serta upaya pemberdayaan masyarakat nagari mencakup *community development* dan *community-based development*. (Setyono, 2002:4). Selain itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan nagari diharapkan partisipasi politik aktif masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah pembangunan nagari yang dihadapi dengan alternatif pemecahannya yang secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya melihat pengaruh antara faktor sosial-ekonomi, politik, fisik dan budaya terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan yang erat dan pengaruh yang positif, kuat dan signifikan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi politik masyarakat dinagari ini, maka orang yang sosial ekonominya cukup baik, akan ada keseimbangan antara kepentingan untuk *survive* secara ekonomi dan politik, sehingga hal-hal yang menyangkut politik dan kepentingan bersama juga penting baginya, adanya anggapan bahwa partisipasi politik dalam pembangunan nagari bermanfaat untuk kepentingan bersama, dapat mewujudkan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat (Samego, 1999:268). Pengaruh yang kuat ini untuk jangka panjang, dengan meningkatkan sosial ekonomi, akan melahirkan desakan dan dorongan untuk turut ambil bagian dalam politik pembangunan yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor politik di nagari ini, tergolong pada *tipe tokenism* yang tercakup dalam tiga sub tipe *pertama, information*, bahwa pendapat masyarakat masih belum ada upaya konkrit secara penuh dari pemerintah nagari

atau lembaga legislatif nagari. Dalam pembahasan kebijakan program pembangunan nagari dan proses pengambilan keputusan masyarakat masih diposisikan untuk mendengar tanpa ada forum diskusi terkait dinagari ini. *Kedua, consultation*, komunikasi politik dinagari ini sudah bersifat dua arah, komunikasi politik pemerintah nagari dengan masyarakat dan sebaliknya, dan komunikasi politik pemerintah nagari dan BPN maupun lembaga nagari lainnya dan sebaliknya serta komunikasi politik antara masyarakat dengan BPN maupun lembaga nagari lainnya. Namun sarana dialog belum dapat sepenuhnya mempertemukan kepentingan, masyarakat, parlemen nagari dan pemerintah nagari. *Ketiga, placation*, bahwa komunikasi politik telah berjalan dengan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah nagari yang dilakukan pada saat pertemuan atau rapat nagari. Media komunikasi politik dinagari ini seperti papan infomasi yang sudah ada baik di kantor Wali Nagari ini maupun di 4 Jorong yaitu Jorong Hilie Banda, Jorong Pakan Sabtu, Jorong Halaban dan Jorong Mudiak Aie yang dipasang di tiap kantor Kepala Jorong sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dinagari ini. Informasi yang cukup mengenai pelayanan yang diberikan dan proyek pembangunan nagari yang sedang digarap, prioritas pembangunan nagari yang direncanakan akan digarap, tujuan dan sasaran proyek terhadap masalah yang dihadapi masyarakat nagari ini, akan membuka partisipasi politik demokratis dalam pembangunan nagari. Ada sikap keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat melalui pengembangan suasana dialogis, sudah adanya dialog dan pertemuan nagari maupun lembaga yang ada dinagari ini dan diskusi, namun masih hanya dalam bentuk formalitas.

Faktor fisik individu dan lingkungan yang berpengaruh lemah terhadap partisipasi politik dalam pembangunan nagari, dikarenakan kondisi nagari ini, meski dilihat dari lokasi jarak kantor Wali Nagari dan rumah penduduk cukup jauh, namun partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Nagari tetap saja berjalan, interaksi warga nagari, pembinaan oleh aparat setempat juga berlangsung intensif, kontak sosial dengan warga dapat berjalan dengan cukup baik. Hasil penelitian di nagari ini menunjukkan secara relatif faktor nilai budaya berpengaruh positif, sangat kuat dan signifikan terhadap partisipasi politik. Hasil temuan menunjukkan bahwa dinagari ini faktor nilai budaya politiknya *semi-democratic*, masyarakat di nagari ini masih kental dengan nilai budaya politik yang tradisional. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dimensi faktor nilai budaya yaitu kepercayaan positif masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari (45,2%) lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak, meski sangat potensial mengkultuskan pemimpin dan munculnya model pemerintahan yang saat ini masih sedikit otoriter.

Kepercayaan politik (*political trust*) masyarakat di nagari yang tergolong cukup, mencerminkan kualitas nilai budaya politik demokratis yang cukup baik, memberikan kecenderungan yang cukup baik pula pada partisipasi politiknya dipangung politik pembangunan nagari. Dari hasil penelitian di nagari ini, yang masih kental dengan nilai budaya politik yang tradisional, mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari.

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari, dipengaruhi oleh dominannya aparat pemerintah nagari dalam pembangunan nagari. Masyarakat masih dianggap *user*, sehingga harus melaksanakan apa yang diputuskan dari atas. Sikap masyarakat masih cukup baik, karena sikap kepatuhan

untuk melaksanakan apa yang diputuskan pimpinan nagari merupakan nilai budaya politik masyarakat tradisional atau kehidupan (perilaku) masyarakat yang masih lekat yaitu hormat pada pemimpin nagari dan rasa sungkan. Dimensi sikap dari faktor nilai budaya inilah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan nagari.

Faktor nilai budaya yang berpengaruh sangat kuat dan sebagai faktor dominan yang mempengaruhi partisipasi politik individu dalam pembangunan nagari, dikarenakan seorang yang berpartisipasi politik membutuhkan dorongan psikologis untuk berpartisipasi politik atau terlibat dalam politik pembangunan nagari. Pengaruh yang sangat kuat faktor nilai budaya terhadap partisipasi politik bagi masyarakat nagari diartikan bukan semata dihitung sebagai sumber daya masyarakat yang mempunyai nilai tambah, melainkan diakui sebagai manusia dan bagian dari membina hak-hak asasi manusia (*Soetrisno, 2000:54*). Semangat faktor nilai-nilai kultur akan mendorong masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerja sama dan berasosiasi dalam pembangunan nagari.

Nilai budaya politik seperti masih menjunjung tinggi patron-client, paternalisme, orientasi fatalistis, sikap loyalitas tunggal, besar pengaruhnya terhadap partisipasi politik karena akan sangat mengganggu proses pengembangan nilai-nilai budaya politik demokratisasi. Didukung dengan kritik yang tidak berkembang dan besar kemungkinan akan membentuk monopoli kekuasaan, *people powerlessness* terutama dalam politik dan ekonomi dan membentuk ketimpangan ketidakadilan yang ada di lingkungannya (*Gaventa, 1980, dalam Amien Rais, 2001:7*) dan institusi nagari yang dibentuk tidak dapat menyentuh lapisan masyarakat.